



## *Bupati Bekasi*

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem dan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
46. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK07/2020 Tentang : Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 1);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 4);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pernyataan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 6);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bekasi Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bekasi Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 8);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**dan**

**BUPATI BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp6.556.744.948.631,00 bertambah sejumlah Rp76.972.532.529,00 sehingga menjadi Rp6.633.717.481.160,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. Semula	Rp 5825.840179.830,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u><del>346.300072688,00</del></u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp5.479.540.107.142,00

<b>b. Belanja Daerah</b>	
1. Semula	Rp 6.470.196.655.131,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>83.520.826.029,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp 6.553.717.481.160,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp (107.417.737.4018,00)
<b>c. Pembiayaan Daerah</b>	
<b>1. Penerimaan</b>	
a) Semula	Rp 7.309.047.688.01,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>423.272.605.217,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp 1.154.177.374.018,00
<b>2. Pengeluaran</b>	
a) Semula	Rp 86.548.293.500,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(6.543.293.500,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp <u>80.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 107.417.737.4018,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

<b>a. Pendapatan asli daerah</b>	
1. Semula	Rp 2.446.413.378.869,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(268.912.117.323,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp 2.177.501.261.546,00
<b>b. Dana Perimbangan</b>	
1. Semula	Rp 19.263.155.020.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(142.560.011.363,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp 17.843.595.490.437,00
<b>c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	
1. Semula	Rp 14.531.112.989.961,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>65.172.056.198,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp 15.182.833.551.59,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

<b>a. Pajak daerah</b>	
1. Semula	Rp 1.994.601.763.757,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(239.784.085.759,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.754.817.677.998,00
<b>b. Retribusi daerah</b>	
1. Semula	Rp 170.366.118.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(5.667.273.500,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 164.698.845.000,00
<b>c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</b>	
1. Semula	Rp 23.531.744.958,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(3.587.415.564,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 19.944.329.394,00
<b>d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	
1. Semula	Rp 25.791.375.1654,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(19.873.342.500,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 23.804.040.9154,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak		
1. Semula	Rp	359.130752.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>26.108.265.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	385.239.017.000,00
b. Dana alokasi umum		
1. Semula	Rp	1.233.146.336.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(124.061.892.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.109.084.444.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1. Semula	Rp	334.038.414.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(44.606.384.563,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	289.432.029.437,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah		
1. Semula	Rp	272.170.800.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>42.135.500.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	314.306.300.000,00
b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp	870.890.315.961,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(90.642.236.402,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	780.248.079.559,00
c. Dana penyesuaian		
1. Semula	Rp	310.050.183.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(7.369.501.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	302.680.682.000,00
3. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1. Semula	Rp	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>121.048.293.600,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	121.048.293.600,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak langsung		
1. Semula	Rp	2986.008.848.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>282.395.691.354,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.268.404.539.754,00
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp	3.484.187.806.731,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(198.874.865.325,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.285.312.941.406,00

(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah			
1. Semula	Rp	2.156.999.785.400,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(64.260.467.700,00)</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp		209.273.9317.700,00
b. Belanja hibah			
1. Semula	Rp	66.682.550.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>19.571.400.000,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp		86.253.950.000,00
c. Belanja bantuan sosial			
1. Semula	Rp	40.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>9.131.583.200,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp		49.131.583.200,00
d. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa			
1. Semula	Rp	216.496.789.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(24.545.136.000,00)</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp		191.951.653.000,00
e. Belanja bantuan keuangan			
1. Semula	Rp	499.729.724.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(5.011.155.000,00)</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp		494.718.569.000,00
f. Belanja tidak terduga			
1. Semula	Rp	610.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>347.509.466.854,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp		353.609.466.854,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai			
1. Semula	Rp	566.720.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>61.259.630.000,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp		618.263.500,00
b. Belanja barang dan jasa			
1. Semula	Rp	240.063.762.7576,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(18.444.446.793,00)</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp		232.193.180.783,00
c. Belanja modal			
1. Semula	Rp	108.298.345.9155,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(21.690.048.532,00)</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp		871.293.410.623,00

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
- a. Penerimaan pembiayaan sejumlah :
    - 1. Semula Rp 730.904.768.801,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 423.272.605.217,00
    - Jumlah setelah perubahan Rp 1.154.177.374.018,00
  - b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah :
    - 1. Semula Rp 86.548.293.500,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp (6.548.293.500,00)
    - Jumlah setelah perubahan Rp 80.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- SILPA tahun anggaran sebelumnya :
- 1. Semula Rp 730.904.768.801,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 423.272.605.217,00
  - Jumlah setelah perubahan Rp 1.154.177.374.018,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- 1. Semula Rp 86.548.293.500,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp (6.548.293.500,00)
  - Jumlah setelah perubahan Rp 80.000.000.000,00

#### Pasal 5

Urutan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini dan
8. Lampiran VIII : Daftar pinjaman daerah.

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPASK PD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKAP-SKPD.

## Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 3**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 20 Oktober 2020

**BUPATI BEKASI**

ttd

**EKA SUPRIA ATMAJA**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 21 Oktober 2020

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** ✓ 1.

 **UJU**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :  
(NOMOR 4/137/2020)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODIS URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	5.825.010.179.810,00	5.479.540.102.142,00	(346.300.072.668,00)	(5,94)
1.1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	2.446.413.378.869,00	2.177.501.261.546,00	(268.912.117.323,00)	(10,99)
1.1.1	Penerimaan Pajak Daerah	1.994.611.176.752,00	1.759.877.877.098,00	(234.733.285.759,00)	(11,77)
1.1.7	Pajak Retribusi Daerah	170.366.118.500,00	164.698.845.000,00	(5.667.273.500,00)	(3,33)
1.1.5	Hutang Pihak Ketiga Kabupaten Daerah yang Pembiayaan	2.153.174.950,00	18.943.293.040,00	(19.087.415.564,00)	(8,86)
1.1.4	Tanpa Kaitan Pembiayaan APBD Daerah yang Set	257.913.751.654,00	338.040.409.154,00	(80.126.657.500,00)	(31,11)
1.2	<b>DANA PERINSANJIAN</b>	926.315.502.000,00	1.783.255.490.421,00	(856.939.511.963,00)	(92,51)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	359.130.752.000,00	385.239.012.000,00	26.108.260.000,00	7,27
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.233.146.336.000,00	11.093.084.444.000,00	(9.859.938.100,00)	(0,79)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	334.038.414.000,00	269.432.029.421,00	(64.606.384.563,00)	(19,33)
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	1.493.111.298.961,00	1.518.283.359.159,00	25.172.056.998,00	1,69
1.3.1	Penerimaan Hibah	272.170.800.000,00	214.306.300.000,00	(57.864.500.000,00)	(21,25)
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	870.890.365.961,00	780.749.072.559,00	(90.141.293.402,00)	(10,35)
1.3.4	Dana Perimbangan dan Otonomi Khusus	310.050.183.000,00	302.680.682.000,00	(7.369.501.000,00)	(2,38)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.210.48293.600,00	1.210.48293.600,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	6.470.196.655.113,00	6.553.717.181.460,00	83.520.526.029,00	1,29
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.286.058.849.400,00	3.268.194.539.754,00	982.135.690.354,00	42,96
2.1.1	Belanja Pegawai	1.156.999.784.400,00	2.092.791.770,00	935.791.986.370,00	80,86
2.1.4	Belanja Hibah	66.682.550.000,00	88.253.950.000,00	21.571.400.000,00	32,35
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	40.000.000.000,00	49.315.832.000,00	9.315.832.000,00	23,29
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Pembiayaan Desa dan Pemerintah Desa	216.496.782.000,00	191.951.653.000,00	(24.545.129.000,00)	(11,34)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	499.729.724.000,00	494.718.569.000,00	(5.011.155.000,00)	(1,00)
2.1.8	Belanja Tidak Tertugas	6.100.000.000,00	353.609.668.554,00	347.509.668.554,00	5,696,88
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.484.187.806.713,00	3.285.522.641.706,00	(198.665.165.007,00)	(5,71)
2.2.1	Belanja Pegawai	566.720.000,00	61.826.350.000,00	61.259.630.000,00	10,809,51
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.627.627.513,00	2.223.706.291.706,00	(176.921.335.807,00)	(7,37)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERYANGKAI / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.3	Berkas Modal	1.082.983.499.555,00	871.293.410.873,00	(211.690.048.532,00)	(19,55)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(644.310.475.202,00)</b>	<b>(107.417.374.018,00)</b>	<b>(429.898.898.717,00)</b>	<b>66,71</b>
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PEMERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	730.904.768.801,00	1.154.177.374.018,00	423.272.605.217,00	57,91
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	730.904.768.801,00	1.154.177.374.018,00	423.272.605.217,00	57,91
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	86.548.293.500,00	80000.000000,00	(6.548.293.500,00)	(75,7)
3.2.1	Pembelian Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	86.548.293.500,00	80000.000000,00	(6.548.293.500,00)	(75,7)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>644.356.475.301,00</b>	<b>107.117.374.018,00</b>	<b>429.820.898.717,00</b>	<b>66,71</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAJUAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DIKARANGPUSAT, 20 Oktober 2020  
BUPATI BEKASI

114

INA SUPRIYA ATMAJATI

Ditandatangani di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 28 Oktober 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 4